



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telepon (021) 3450038, Faksimile (021) 3851193, 34830261, 3846430
Laman: www.kemendagri.go.id Pos-el: sekjen@kemendagri.go.id

16 Juli 2025

Nomor : 900.1.3/3847/SJ
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II Tahun 2025

Yth. Daftar Nama Terlampir

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, telah dilakukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2025 lingkup Kementerian Dalam Negeri. Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas implementasi perencanaan penganggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Penilaian sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan dengan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terhadap 27 Satuan Kerja Lingkup Kemendagri yang datanya bersumber dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kementerian Keuangan. Nilai akhir IKPA Kemendagri Triwulan II Tahun 2025 adalah **97,36** atau **naik sebesar 2,47** point dibandingkan Tahun 2024 yaitu 94,89 dan telah mencapai target Tahun 2024 yaitu sebesar 96.

Jika dilihat dari nilai keseluruhan indikator di masing-masing, satker yang prestasi kinerja yang sangat baik dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendagri (didas 96) yaitu 25 Satker Kantor Pusat/UPT termasuk **4 satker yaitu Ditjen Keuda, BPSDM, Ditjen Polpum, dan Itjen yang mendapat nilai sempurna (100)**. Terkait hal ini kami mengapresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan.

Sedangkan **satker yang perlu mendapatkan perhatian** dan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerjanya yaitu DKPP (95,76), dan Ditjen Dukcapil (94,83). Dari hasil penilaian IKPA Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diatas, terdapat beberapa Indikator yang nilainya kurang optimal, yaitu:

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran

Deviasi Halaman III DIPA, mendapatkan nilai 12,99 dari nilai bobot 15 yang diakibatkan adanya penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) yang mencapai 13,41% dari batas toleransi deviasi 5%. Adapun Satker yang deviasinya diatas 25% yaitu pada Ditjen Dukcapil;

2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- a. **Penyerapan Anggaran**, mendapatkan nilai 19,42 dari nilai bobot 20 yang diakibatkan oleh tidak tercapainya target penyerapan yang dinilai setiap triwulan oleh sebagian besar satker lingkup Kemendagri. Adapun Satker yang nilainya berada dibawah rata-rata Kemendagri yaitu Balai Pemdes Malang, Balai Pemdes Yogya, PPSDM Bukittinggi, dan Setjen;
- b. **Penyelesaian Tagihan**, mendapatkan nilai 9,97 dari nilai bobot 10 yang diakibatkan keterlambatan penyelesaian tagihan langsung (LS) Kontraktual yang diajukan ke KPPN melewati 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP). Adapun terdapat total 3 keterlambatan dari total 872 penyampaian kontrak ke KPPN dan satker yang mengalami hal tersebut yaitu Ditjen Pemdes; dan

3. Aspek Kualitas Hasil

Capaian Output, mendapatkan nilai 24,98 dari bobot 25 diakibatkan 2 satker yang nilainya tidak maksimal yaitu IPDN Jatinangor dan DKPP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di Tahun 2025 khususnya untuk Triwulan III, bersama ini diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah strategis perbaikan kinerja, sebagai berikut:

1. Melakukan penyerapan anggaran 70% sampai dengan 30 September 2025 (Triwulan III);
2. Menginventarisir pekerjaan kontraktual yang belum dilaksanakan, segera memproses pengadaan barang/jasa, melakukan pendaftaran data kontrak, dan melakukan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan;
3. Menghindari keterlambatan penyelesaian tagihan dan keterlambatan pengajuan penggantian UP/TUP;
4. Menyampaikan data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dan memastikan Progres Capaian Rincian Output (PCRO) atau Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) berdasarkan target setiap bulannya yang ditetapkan oleh satker;
5. Melakukan proses input data Target PCRO dan Target RVRO Bulanan di Aplikasi SAKTI pada awal tahun dan dapat dimutakhirkan sesuai dengan periode Pemutakhiran Halaman III DIPA;
6. Memerintahkan PPK untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban dan menguji kebenarannya pada setiap tagihan yang diajukan ke KPA;
7. Intensifkan pemantauan dan pengendalian terhadap permasalahan pengelolaan keuangan serta lakukan koordinasi penyelesaian dengan instansi terkait (internal/eksternal); dan
8. Bagi Unit Kerja Eselon I yang memiliki satuan kerja daerah (Balai Pemdes, PPSDM, IPDN Kampus Daerah, Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan) agar memerintahkan untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai bahan keperluan manajerial, terlampir disampaikan nilai IKPA Triwulan II Tahun 2025 Satker Lingkup Kemendagri yang bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal

Tomsu Tohir

Lampiran

Nomor : 900.1.3/3847/SJ

Tanggal : 16 Juli 2025

1. Tomsu Tohir, Sekretaris Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri;
2. Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H, Inspektur Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri;
3. Dr. Drs. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, AP., M.Si, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
5. Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
6. Dr. Drs. Safrizal Za, M.Si, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada Kementerian Dalam Negeri;
7. Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
8. Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri;
9. Ir. Restuardy Daud, M.Sc, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
10. Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Dalam Negeri;
11. Dr. Yusharto Huntayungo, M.Pd, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri;
12. Dr. Halilul Kahiri M.Si Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2025 (s.d. JUNI 2025)
SATKER KANTOR PUSAT DAN UPT LINGKUP KEMENDAGRI

Urutan berdasarkan Satker Terbaik

No	Uraian Satker	Perencanaan		Pelaksanaan				Hasil	Nilai Total
		Revisi DIPA	Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Selesai Tagihan	UP dan TUP	Capaian Output	
		10	15	20	10	10	10	25	
1	DITJEN KEUDA	10	15	20	10	10	10	25	100
2	BPSDM	10	15	20	10	10	10	25	100
3	DITJEN POLPUM	10	15	20	10	10	10	25	100
4	ITJEN	10	15	20	10	10	10	25	100
5	DITJEN OTDA	10	15	19.99	10	10	10	25	99.99
6	IPDN SULUT	10	15	20	10	10	9.9	25	99.9
7	IPDN NTB	10	15	19.92	10	10	9.82	25	99.74
8	DITJEN BANGDA	10	15	19.8	10	10	9.85	25	99.66
9	PPSDM MAKASSAR	10	15	19.61	10	10	10	25	99.61
10	PEMDES MALANG	10	15	19.18	10	10	10	25	99.18
11	IPDN PAPUA	10	14.03	20	10	10	10	25	99.03
12	PEMDES LAMPUNG	10	13.87	19.98	10	10	10	25	98.85
13	IPDN SULSEL	10	13.81	20	10	10	9.97	25	98.78
14	IPDN KALBAR	10	13.68	20	10	10	10	25	98.68
15	DITJEN PEMDES	10	15	20	10	8.89	9.73	25	98.62
16	PPSDM YOGYA	10	14.16	19.52	10	10	9.93	25	98.61
17	BSKDN	10	13.55	19.96	10	10	10	25	98.51
18	DITJEN ADWIL	10	13.31	20	10	10	9.79	25	98.1
19	PEMDES YOGYA	10	13.99	19.21	0	0	10	25	97.74
20	PPSDM BANDUNG	10	12.69	20	10	10	9.98	25	97.67
21	IPDN JATINANGOR	10	13.22	20	10	10	9.97	24.43	97.62
22	IPDN SUMBAR	10	13.22	20	10	10	9.14	25	97.35
23	PPSDM BUKITTINGGI	10	14.22	18.37	10	10	9.61	25	97.21
24	BALAI SATPOL PP & DAMKAR	10	12.21	20	10	10	9.98	25	97.19
25	SETJEN	10	13.29	17.79	10	10	9.96	25	96.04
26	DKPP	10	11.73	19.98	10	10	10	24.06	95.76
27	DITJEN DUKCAPIL	10	10.37	19.86	10	10	9.59	25	94.83
KEMENDAGRI		10	12.99	19.42	10	9.97	10	24.98	97.36

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan per tanggal 15 Juli 2025 Pukul 15.00 WIB